

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Abdullah, Ilyas, *Cakrawala Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2023.
- Aditya, Zaka Firma, dkk. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok 2023.
- Ali, Faried, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Arto, Ali Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna, dan Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna, *Hukum Acara dan Wacana Citizen Lawsuit di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Brahim, J., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Deepublish, 2006.
- De Cruz, Peter. *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Socialist Law*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron. Nusa Media, Bandung, 2019.
- Efendi, A'an, dan Sudarsono, *Pilar-Pilar Hukum Administrasi*, Kencana, Jakarta, 2025.
- Efendi, Aan, dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Farida Patittingi, *Implementasi Qr (Quick Response) Code pada Sertifikat Tanah Elektronik*, CV. Tohar Media, Gowa, 2023.
- Hadjon, Philipus M., dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Hamidi, Jazim, *Makalah External Review atas Penjelasan Hukum AUPB*, Jakarta, 2015.
- Hardiyanti, Diah Pitaloka, dkk., *Dasar Hukum (Kajian Khusus Teori Hukum di Indonesia)*, PT. Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2012.

- Hasddin, dkk., *Dinamika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sejarah, Teori, & Peninjauan Ulang RTRW*, Madani Kreatif Publisher, Yogyakarta, 2022.
- Hasjad, *Hukum Administrasi Negara: Teori, Regulasi dan Praktik Pemerintahan*, CV. Gita Lentera, Padang, 2025.
- Herman, *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Jeffri Arlinandes Chandra, M., Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, dan Vera Bararah Barid, *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia*, CV Zigie Utama, Bengkulu, 2019.
- Jurdhi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta, 2023.
- Kupita, Weda, *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2023.
- Kupita, Weda, *Materi Kuliah Hukum Acara Peratun (Hukum Acara Peratun)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2023.
- Laritmas Selfinus, dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2024.
- Lubis, Mhd. Ansor, *Hukum Acara PTUN: Mekanisme Sengketa Administrasi, Konsep, Teori dan Putusan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Pratiwi, Cekli Setya, dkk., *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, LeIP, Jakarta, 2016.
- Purwanto, Rivan Achmad dkk., *Amicus Curiae: Konsep, Praktik, dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2024.
- Rachman, Sri Nurmaningsih, *Hukum Administrasi Negara*, Madani Kreatif Publisher, Sleman, 2025.
- Rahman, Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007.
- Sudarsono, *Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*, Kencana, Jakarta, 2019.

- Suhady, Idup, *Kepemerintahan yang Baik, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia*, Jakarta, 2009.
- Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum, Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2023.
- Triwulan T., Titik, dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Umar Dani, *Konsep Dasar Dan Prinsip-Prinsi Peradilan Tata Usaha Negara*, 1st ed., Rajawali Pers, Depok, 2022.
- Wijaya, Endra, dan Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Yuliana, dkk. *Statistik*, CV. Azka Pustaka, Pasaman Barat, 2023.
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Zamroni, M., dan Ahmad Heru Romadhon, *Hukum Administrasi Negara*, Delta Pijar Khatulistiwa, Sidoarjo, 2021.

Peraturan Perundang–Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Seluruh Indonesia).

Putusan Nomor 89/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Putusan Nomor 68/G/TF/2022/PTUN.SMG.

Jurnal Ilmiah

Abrianto, Bagus Oktafian, dkk. Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Arena Hukum*, Vol. 16, No. 3, 2023.

Alfian, Muhammad, dkk., Kompetensi Mengadili Peratun Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Antoro, B. Hengky Widhi dan Rosita Miladmahesi. Dinamika Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Arianto, Henry, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 3, 2012.

Aris, Mohamad Syaiful, dkk, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga PERMASyarakatan, *Jurnal Litigasi*, Vol. 23, No. 2, 2022.

Arwanto, Bambang. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah. *Yuridika*, Vol. 31, No. 3, 2016.

Astuti, Fakhriyah Tri, dkk. Studi Komparatif Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya (Inggris dan Wales), *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Barokah, Muharnad Raziv, dan Anna Erliyana, Pergeseran Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 4, 2021,

Benuf, Kornelius, dan Azhar, Muhamad, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.

- Dani, Umar, Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi tentang Struktur dan Karakteristiknya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018.
- Dewi, Erna, Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2010.
- Fellista Ersyta, dan Laga Sugiarto, Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Meliputi Tindakan Faktual, *Justiciabelen*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Gunawan, Andy, dkk, Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Hakim, M. Aunul dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti. Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 14, No. 1, 2022.
- Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Halilah, Siti, Instrumen (Sarana) Tindak Pemerintahan, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 6, Edisi II, Desember 2023, hlm. 52.
- Haryono, Waty Suwarty, Azas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum, *Ius Constitutum*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Hevy Yushant, Ni Ketut. Tinjauan Kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 6, 2020.
- Leonard, Lapon Tukan dan Aju Putrijanti. Kompetensi Peratun untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal IUS*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Malaka, Zuman, dkk., Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Peradilan di Indonesia, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Maslul, Syaifulhalil, Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindakan Faktual di PTUN (Studi Putusan PTUN Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI), SENTRI, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 3, 2022.
- Miftah, Farrah, Peran Asas Pembuktian Bebas Sebagai Beban Pembuktian Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 8, 2022.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, Penjelasan Hukum (*Restatement*) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 1, 2022.

- Perdana, Muhammad Rizky, dkk., Peran Hukum Acara dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Prabowo, Maulidya Shamira Putri, Kewenangan Mengadili Tindakan Faktual oleh Pejabat (Perbuatan Melawan Hukum) Melalui Citizen Lawsuit (Studi Kasus Putusan Nomor 756/PDT.G/2020/PN.MDN), *Pemuliaan Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Prasetyo, Bayu, dkk. Argumentasi Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian. *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Putra, Eduard Awang Maha, Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Putra, Hidayat Pratama, Tantangan dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara (Challenges in the Examination of Government Administrative Action Cases in Administrative Court), *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Putrijanti, Aju, dkk. Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, 2018.
- Ramadhani, Alqoni'atuz Zakiyatur, Leonard, Lapon Tukan, dan Utama, Kartika Widya. Membedah Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT Terkait Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Rayfindratama, Alva Dio, Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Rhayasya Admmi Habibani, dkk., Penerapan Prinsip Legalitas dalam Kebijakan Administrasi Publik, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 12, 2024.
- Ridwan, Despan Heryansyah, dan Pratiwi, Dian Kus. Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, 2018.
- Riza, Dola. Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Salipu, M. Rendra. Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang melalui Saber Pungli. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Simanjuntak, Enrico, Restatement tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Solechan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 3, 2019.

Stoffel, Mukti, Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan, *Law Development & Justice Review*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Zakaria, Riana, dkk., Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.Sby), *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 6, 2023.

Zamzami, Abid, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, *Yurispruden*, Vol. 3, No. 2, 2020.

